

DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM PERSEPEKTIF ISLAM

Sry Wahyuni¹, Devi Afriani², Chanifudin³

yunisry572@gmail.com¹, defiafriani48@gmail.com², chanifudin@kampusmelayu.ac.id³

STAIN Bengkalis

ABSTRAK

Pendidikan adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui pengajaran, pembelajaran, atau pengalaman. Pendidikan juga membuka pintu kesempatan, memperluas pandangan dunia, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mempromosikan perkembangan pribadi yang holistik. Dengan pendidikan, seseorang dapat mengatasi tantangan, menciptakan perubahan positif, dan berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat secara kolektif, baik langsung atau melalui wakil yang dipilih secara demokratis. Pendidikan agama Islam menghargai demokrasi karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam Islam seperti keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan partisipasi aktif sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Islam mendorong untuk memperlakukan semua individu dengan adil, menghormati kebebasan berpendapat, dan mempromosikan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai bagian dari ajaran agama yang bermartabat dan progresif. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa pendidikan agama Islam mengajarkan toleransi, dialog antar budaya, dan penghargaan terhadap kebebasan beragama serta kebebasan berekspresi, yang merupakan nilai-nilai inti dari sistem demokrasi.

Kata Kunci : Demokrasi, Pendidikan Dan Islam.

PENDAHULUAN

Sejarah munculnya demokrasi berawal dari masa pertengahan pada abad 5 Sebelum Masehi. Istilah ini telah digunakan oleh banyak sistem politik pada sejumlah negara, termasuk Yunani, khususnya Athena. Di sisi lain demokrasi juga memiliki kaitan erat dengan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintah karena beberapa alasan seperti; kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan dan akuntabilitas, inovasi dan kreativitas, stabilitas dan kedamaian dan lain sebagainya. Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasi lah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: input, proses, dan output.

Sejak berdirinya era reformasi, kehidupan masyarakat Indonesia menjadi serba terbuka dan transparan. Berbeda pada masa orde baru yang terkesan ditutup-tutupi dan rakyat seolah terkekang atau kurang bebas dalam gerakannya. Salah satu tuntutan rakyat pada masa itu yaitu demokrasi. Sejak masa reformasi demokrasi kembali ditegakkan. Hal tersebut sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan salah satunya pendidikan yaitu dengan adanya demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan adalah suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan tenaga pendidik yang sama dan adil kepada semua siswanya tanpa membedakan dalam segala aspek dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Demokrasi pendidikan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam bidang pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan juga status sosial sehingga individu

memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan. Pendidikan demokratis adalah pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog, dan keikutsertaan seluruh pihak. Dari uraian dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pendidikan adalah pendidikan yang menerapkan nilai-nilai demokrasi yaitu pendidikan dimana didalamnya terdapat proses pembelajaran yang tidak membedakan siswa baik secara status sosial, suku, agama, ras, maupun membedakan siswa dari aspek yang lainnya. Demokrasi pendidikan diwujudkan dalam pembelajaran di sekolah yang demokratis yaitu dengan melibatkan semua pihak seperti guru, murid, maupun pihak lain yang terlibat dalam pendidikan.

Demokrasi dalam pendidikan Islam di Indonesia cenderung mencakup prinsip-prinsip partisipasi, keadilan, dan kebebasan. Ini mencakup pengambilan keputusan kolektif, pemberian suara, dan penekanan pada nilai-nilai egaliter. Namun, pendekatan ini juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah (berunding), syura (konsultasi), dan keadilan sosial. Selain itu, pentingnya pendidikan dalam Islam sering ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan bertanggung jawab secara moral. Begitu pula saat Islam dihadapkan dengan sistem demokrasi, Sikap Islam terhadap sistem demokrasi dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan konteksnya. Secara umum, Islam memberikan dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti keadilan, konsultasi (syura), dan kebebasan bersuara. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan: (1) Kompatibilitas dengan nilai-nilai Islam: Islam mendukung sistem demokrasi yang menghormati nilai-nilai etika dan moral Islam serta memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. (2) Konteks dan implementasi: Sikap Islam terhadap demokrasi dapat dipengaruhi oleh bagaimana sistem demokrasi diimplementasikan dalam praktiknya. Misalnya, Islam mungkin menentang sistem demokrasi yang melanggar prinsip-prinsip keadilan atau yang mengabaikan nilai-nilai agama. (3) Perlindungan terhadap kepentingan umum: Islam menekankan pentingnya melindungi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks sistem demokrasi. (4) Kepemimpinan yang adil: Islam mendukung kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab, baik dalam konteks sistem demokrasi maupun dalam sistem pemerintahan lainnya.

Sikap Islam terhadap sistem demokrasi sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip utama Islam dan bagaimana sistem demokrasi tersebut dijalankan dalam praktiknya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan kontekstual perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi hubungan antara Islam dan sistem demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data didapatkan dari artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal dan juga dari artikel yang diterbitkan serta website yang ada dalam internet. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dipilah dan disusun sesuai dengan topik yang dibahas dan data dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi Dan Pendidikan

Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “paes” artinya anak dan “agogos” artinya membimbing. Jadi paedagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan

berasal dari kata “educate” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang beradab dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar *didik* (mendidik), yaitu: memelihara dan memberilatih (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses pengubahsikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. (Depdiknas, 2013: 326). Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiranserta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ada Beberapa para ahli yang mendefinisikan apa itu pendidikan diantaranya; Ahmad dan Uhibiyati mengemukakan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicitacitakan dan berlangsung terus menerus. Abdurrahman Saleh Abdullah menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru ke arah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi, Jhon Dewey menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia”. Di lain pihak Oemar Hamalik juga menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demo* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum masehi, awalnya sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarkid dan kediktatoran di Yunani. Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi secara kebahasaan ialah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi secara lebih luas ialah segala hal yang memiliki asas kemerdekaan, asas persamaan, dan asas persaudaraan pada lingkungan yang dijalanannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang menerapkan nilai-nilai demokrasi yaitu pendidikan di mana di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang tidak membedakan siswa baik secara status sosial, suku, agama, ras, maupun membedakan siswa dari aspek yang lainnya. Demokrasi pendidikan diwujudkan dalam pembelajaran di sekolah yang demokratis yaitu dengan melibatkan semua pihak seperti guru, murid, maupun pihak lain yang terlibat dalam pendidikan.

Setelah mengetahui makna demokrasi dan pendidikan maka kita akan mengetahui arti dari demokrasi pendidikan yang merupakan salah satu unsur dalam pendidikan yaitu demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan dimaknai sebagai pendidikan yang bertumpu pada nilai-nilai demokratis dan *pedagogy of hope*. Pendidikan demokratis adalah pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog, dan keikutsertaan seluruh pihak. Demokrasi pendidikan merupakan konsep di mana keputusan-keputusan terkait pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kebijakan, melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, murid, orang tua, dan komunitas lokal. Analisis terhadap demokrasi pendidikan bisa mencakup beberapa aspek seperti, Partisipasi Siswa: Demokrasi pendidikan memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, seperti melalui dewan siswa atau forum diskusi siswa. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasa memiliki pendidikan mereka sendiri. Peran Guru: Guru bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Mereka juga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah, misalnya melalui komite kebijakan sekolah. Peran Orang Tua: Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung demokrasi pendidikan dengan terlibat dalam kegiatan sekolah dan mengadvokasi kepentingan anak-anak mereka. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam organisasi orang tua guru (OPG) atau dewan sekolah. Transparansi dan Akuntabilitas: Demokrasi pendidikan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pendidikan. Proses pengambilan keputusan harus terbuka untuk semua pihak yang terlibat dan harus ada mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban. Pendidikan Inklusif: Konsep demokrasi pendidikan juga mencakup pendekatan inklusif yang memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang beragam. Pengambilan Keputusan atau Kebijakan dalam pendidikan: Di tingkat kebijakan, demokrasi pendidikan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, seperti melalui konsultasi publik atau forum diskusi, yang mana Kebijakan merupakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan program. Kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Cara

memandang masalah kebijakan bersifat komprehensif, artinya bagian-bagian dilihat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Pengembangan Kurikulum: Demokrasi pendidikan juga dapat tercermin dalam proses pengembangan kurikulum yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan relevansi, keterlibatan, dan keberagaman dalam materi pembelajaran.

Dengan demikian, demokrasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, yang memungkinkan setiap individu untuk memiliki suara dalam proses pendidikan mereka.

Demokrasi Pendidikan Dalam Islam

Demokrasi dalam pendidikan Islam memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, dimana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi, sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Disisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat.

Demokratisasi pendidikan dalam Islam adalah konsep yang mengacu pada Upaya untuk memastikan bahwa pendidikan dalam konteks Islam dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau jenis kelamin mereka. Konsep ini berakar dalam nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Islam, prinsip demokrasi pendidikan tercermin dalam berbagai konsep dan nilai-nilai yang dianut dalam ajaran Islam. Beberapa uraian tentang demokrasi pendidikan dalam Islam dapat mencakup:

1. **Kepentingan Pendidikan:** Islam menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dan tanggung jawab setiap individu. Demokrasi pendidikan dalam Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka.
2. **Kepemimpinan Partisipatif:** Konsep musyawarah dalam Islam mencerminkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Musyawarah adalah proses konsultasi dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks pendidikan.
3. **Keadilan dan Kesetaraan:** Prinsip kesetaraan dalam Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
4. **Pendidikan Inklusif:** Islam mengajarkan nilai-nilai inklusi dan keadilan sosial. Demokrasi pendidikan dalam Islam mencakup aspek inklusif yang memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua individu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang beragam.
5. **Pengembangan Karakter:** Pendidikan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan akuisisi pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter yang baik. Demokrasi pendidikan dalam Islam mempromosikan pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etik yang diajarkan dalam ajaran Islam.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan juga ditekankan dalam Islam. Demokrasi pendidikan mengharuskan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan jujur, serta adanya mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, dalam konteks Islam, demokrasi pendidikan tidak hanya mencakup aspek partisipatif dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, inklusivitas, dan keadilan yang menjadi landasan ajaran Islam. Mengacu pada uraian demokrasi di atas, maka Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada individu (peserta didik) untuk mengembangkan nilai-nilai kodrati yang ada di dalamnya sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga hal tersebut merupakan prinsip demokrasi. Islam juga mewajibkan pendidik memberikan bimbingan dengan tidak membatasi kebebasan pribadi anak dalam mengembangkan potensi bawaannya.

Secara etimologis umat Islam tidak mengenal kata demokrasi, Islam hanya mengenal istilah nasehat atau musyawarah sebagai landasan terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Berawal dari konsep musyawarah, Islam memperkenalkan konsep demokrasi, sebuah konsep yang mengharuskan seluruh proses pendidikan didasarkan pada partisipasi, kebebasan, dan kesetaraan. Demokrasi dalam Islam bertujuan untuk mencapai beberapa hal yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam diantaranya ialah: pemberdayaan individu, keadilan dan kesejahteraan, pembentukan karakter moral, Pendidikan inklusif, dan peningkatan kualitas Pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pentingnya Pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, pertumbuhan intelektual, dan pengembangan karakter dalam kerangka ajaran Islam. Seperti hadis Nabi yang menjelaskan bahwa mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu:

(مسلم كل على فريضة العلم طلب)

Artinya: “menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”

Beberapa nilai-nilai yang dapat diidentifikasi dalam Al-Quran yang relevan dengan konsep demokrasi antara lain:

- 1) Musyawarah (Konsultasi): Al-Quran menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Surah Ali Imran ayat 159 menyatakan: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Ini mencerminkan prinsip partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan, yang menjadi inti dari demokrasi.
- 2) Keadilan: Al-Quran secara konsisten menekankan pentingnya keadilan. Surah An-Nisa ayat 135 menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu." Prinsip keadilan ini menjadi fondasi bagi sistem demokrasi yang adil.
- 3) Kesejateraan: Al-Quran menyatakan bahwa di hadapan Allah, semua manusia memiliki nilai yang sama. Surah Al-Hujurat ayat 13 menyatakan: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Nilai kesetaraan ini mencerminkan esensi dari demokrasi yang menempatkan semua individu pada posisi yang sama di dalam masyarakat.
- 4) Transparansi dan Pertanggung jawaban: Al-Quran menekankan pentingnya transparansi dan pertanggung jawaban dalam semua aspek kehidupan. Surah Al-Mulk ayat 2 menyatakan: "Dia-lah yang menciptakan kematian dan kehidupan, supaya Dia

menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Prinsip ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

Nilai-nilai ini mencerminkan kompatibilitas antara prinsip-prinsip demokrasi dan ajaran Al-Quran, menunjukkan bahwa Islam memberikan fondasi moral dan etis yang kuat bagi penerapan demokrasi dalam konteks sosial dan politik.

Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak (peserta didik) mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan, adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil.

Sebagaimana amanat UUD 1945 mengatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Pendidikan yang mencerdaskan rakyat adalah pendidikan yang membawa warga negaranya sebagai anggota masyarakat demokratis. Proses pendidikan yang demikian bukanlah proses indoktrinasi tetapi menyadarkan rakyat akan hak-haknya dan memberikan kemampuan pada rakyat untuk secara bersama-sama mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Jadi siswa di sekolah harus merasakan bahwa sekolah bagi mereka sungguh merupakan tempat yang akan menggali potensi yang dimiliki. Dengan kondisi yang tidak diskriminatif dan berkeadilan, anak yang berasal dari keluarga miskin pun berhak mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dan tidak heran ketika muncul kesadaran dan daya kritis tentang keberadaan Rintisan Sekolah Bertarif Internasional (RSBI) yang akhir-akhir ini dipertanyakan dan diklaim untuk ditiadakan. Karena itu, untuk mendidik warga negara yang baik, pendidikan demokratis mutlak dibutuhkan.

Pembelajaran demokratis pada dasarnya menghendaki agar setiap proses pembelajaran di kelas berlangsung secara seimbang antara peranan guru dan siswa. Posisi guru di kelas memfasilitasi kegiatan belajar siswa, sedangkan siswa diberikan berbagai kebebasan untuk melakukan berbagai aktifitas, inovasi, ekspresi, eksplorasi, dan aktualisasi diri dengan tetap mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan. Pembelajaran demokratis dapat diimplementasikan melalui belajar dengan tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, dan sosiodrama tercakup dalam strategi pembelajaran demokratis yang di dalamnya ada strategi inkuiri, ekspositori dan kooperatif.

KESIMPULAN

Jadi paedagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata «educate» yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata «to educate» yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Abdurrahman Saleh Abdullah menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru kearah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi, Jhon Dewey menjelaskan bahwa «Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia». Dilain pihak Oemar Hamalik juga menjelaskan bahwa «Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat». Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum masehi, awalnya sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di Yunani. Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih.

Demokrasi secara kebahasaan ialah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi secara lebih luas ialah segala hal yang memiliki asas kemerdekaan, asas persamaan, dan asas persaudaraan pada lingkungan yang dijalanannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara.

demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang menerapkan nilai-nilai demokrasi yaitu pendidikan dimana didalamnya terdapat proses pembelajaran yang tidak membedakan siswa baik secara status sosial, suku, agama, ras, maupun membedakan siswa dari aspek yang lainnya. Demokrasi pendidikan diwujudkan dalam pembelajaran di sekolah yang demokratis yaitu dengan melibatkan semua pihak seperti guru, murid, maupun pihak lain yang terlibat dalam pendidikan. Proses pengambilan keputusan harus terbuka untuk semua pihak yang terlibat dan harus ada mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban. Kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner.

Cara memandang masalah kebijakan bersifat komprehensif, artinya bagian-bagian dilihat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Dengan demikian, demokrasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, yang memungkinkan setiap individu untuk memiliki suara dalam proses pendidikan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anistianingsih, nusyahrani, dkk, DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM, jurnal Bahasa dan Pendidikan, oktober 2023, vol.3, no.4, hal.204
- Darsyah syukron, chanifudin, KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN, At-Thullub: jurnal of Islamic studies, juni 2020, vol.1, no.1, hal.119.
- Hidayat rahmat, abdilah, ILMU PENDIDIKAN “konsep teori, dan aplikasinya”, (medan : lembaga peduli pengembangan pendidikan indonesia;LPPPI), September 2019, hal. 24.
- Ibu Majah bin Muhamad bin Yazid bin Majah Al Qazwini (Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh. Jakarta : Shahih, 2016), hal.917.
- Kasih ekawahyu, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” JURNAL KAJIAN LEMHANNAS RI, no. 34 (June 2018).
- Khuzaimah, farid pribadi, “Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Siswa Disdasarekolah.” AL MA’ARIF ; JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA 4, no. 1 (2022): Hal. 44.
- Martina, fitri sarinda dkk, DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM ISLAM, journal of humanities and education, desember 2023, vol.2, no.4, hal.154.
- Murdani, Implementasi Pembelajaran Demokratif: Sebuah Studi Tentang Pembelajaran SKI Pada Madrasah Tsanawiyah Di Aceh, jurnal ilmiah islam futura, february 2015, vol.14, no.2, hal.258.
- M.Sirozi, Politik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.155.
- Sunarso, MEMBEDAH DEMOKRASI, (yogyakarta ; UNY PRESS 2015), HAL. 10.
- Supardan dadang, “Sejarah Dan Prospek Demokrasi.” SOSIO DIDAKTIKA : Social Science Education Journal 2, no. 2 (2015): hal. 126.
- Tilaar, standarisasi Pendidikan nasional, (Jakarta: rineka cipta, 2012).